

## Partisipasi Politik Perempuan di Kabupaten Kendal Pasca Pemilu 2024

Susi Widiya Putri<sup>1</sup> & Yulita Nilam Fridiyanti<sup>2</sup>

Universitas Wahid Hasyim

<sup>1</sup>[puteriii2004@gmail.com](mailto:puteriii2004@gmail.com), <sup>2</sup>[yulitanilam@unwahas.ac.id](mailto:yulitanilam@unwahas.ac.id)

DOI: 10.32699/resolusi.v7i1.7531

Submitted: 2024-07-08, Revised: 2024-08-21, Accepted: 2024-09-23

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi efektif guna meningkatkan partisipasi politik perempuan di Kabupaten Kendal pasca Pemilu 2024, dengan fokus pada pengurangan hambatan patriarki. Meski demokrasi telah membuka ruang bagi partisipasi, perempuan masih menghadapi tantangan signifikan, seperti budaya patriarki, diskriminasi gender, kekerasan politik, serta minimnya dukungan dari keluarga dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis tinjauan pustaka untuk mengkaji literatur terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa budaya patriarki dan rendahnya dukungan partai politik merupakan hambatan utama. Beberapa strategi yang diusulkan meliputi penerapan kebijakan afirmatif, kampanye kesadaran masyarakat, penguatan jaringan perempuan, serta melibatkan laki-laki sebagai mitra. Diperlukan upaya komprehensif dan berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi politik perempuan di Kabupaten Kendal.

**Kata kunci:** partisipasi politik perempuan, kesetaraan gender, kebijakan afirmatif, patriarki

### Abstract

This study aims to identify effective strategies to increase women's political participation in Kendal Regency after the 2024 elections, with a focus on reducing patriarchal barriers. Although democracy has opened up space for participation, women still face significant challenges, such as patriarchal culture, gender discrimination, political violence, and a lack of support from families and communities. This research uses a qualitative method based on literature review to examine related studies. The analysis results show that patriarchal culture and limited political party support are the main obstacles. Proposed strategies include the implementation of affirmative policies, public awareness campaigns, strengthening women's networks, and involving men as partners. Comprehensive and sustainable efforts are needed to create an environment that supports women's political participation in Kendal Regency.

**Keywords:** women's political participation, gender equality, affirmative policies, patriarchy

## Pendahuluan

Partisipasi politik perempuan telah menjadi salah satu isu penting dalam kajian demokrasi modern, khususnya dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan gender. Di seluruh dunia, perempuan masih sering menghadapi tantangan signifikan dalam partisipasi politik, mulai dari hambatan struktural hingga kultural. Di Indonesia, meskipun reformasi politik yang dimulai sejak akhir 1990-an telah membuka ruang bagi keterlibatan perempuan dalam politik, tantangan tersebut tetap ada, terutama di daerah-daerah yang masih didominasi oleh budaya patriarki yang kuat. Salah satu daerah yang menghadapi masalah ini adalah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, di mana perempuan masih sering terpinggirkan dalam berbagai aspek kehidupan politik.

Budaya patriarki yang telah lama mengakar dalam masyarakat Indonesia memberikan batasan signifikan bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Patriarki merujuk pada sistem sosial di mana laki-laki memegang kendali atas kekuasaan dan hak-hak istimewa, sedangkan perempuan ditempatkan dalam posisi subordinat. Dalam konteks ini, perempuan sering kali dianggap tidak cocok untuk menduduki peran-peran publik, seperti dalam politik, yang dianggap sebagai ranah laki-laki (Setyawan, 2020). Hal ini diperparah dengan adanya stereotip gender yang menempatkan perempuan sebagai individu yang seharusnya hanya berfokus pada peran domestik, seperti mengurus keluarga dan rumah tangga. Di Kabupaten Kendal, stereotip ini masih sangat kuat, menghalangi perempuan untuk terlibat secara aktif dalam politik (Kalibonso, 2019).

Selain patriarki, perempuan di Kabupaten Kendal juga menghadapi diskriminasi gender yang masih kuat di berbagai sektor, termasuk politik. Diskriminasi ini tercermin dalam akses yang terbatas terhadap sumber daya politik, termasuk kurangnya dukungan dari partai politik. Penelitian Novitasari (2020) menunjukkan bahwa meskipun perempuan memiliki potensi untuk berpartisipasi dalam politik, mereka sering kali tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari partai politik, baik dalam hal pencalonan maupun dalam bentuk dukungan kampanye. Kondisi ini menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan laki-laki dalam kompetisi politik.

Selain itu, kekerasan politik terhadap perempuan juga menjadi hambatan signifikan yang mengurangi keinginan perempuan untuk terlibat dalam politik. Kekerasan politik ini bisa bersifat fisik maupun psikologis, yang dirancang untuk menakut-nakuti perempuan agar mundur dari panggung politik. Kasus-kasus kekerasan ini sering kali tidak dilaporkan atau tidak mendapat perhatian yang cukup dari otoritas terkait, sehingga perempuan merasa rentan dan enggan untuk terlibat lebih jauh dalam politik. Budiardjo (2008) menekankan bahwa kekerasan politik terhadap perempuan, termasuk dalam bentuk intimidasi, merupakan salah satu tantangan terbesar dalam upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan.

Minimnya dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial juga memperburuk situasi. Dalam banyak kasus, keluarga dan masyarakat di Kabupaten Kendal cenderung tidak mendukung perempuan yang ingin terjun ke dunia politik, dengan alasan bahwa politik adalah dunia yang keras dan tidak sesuai dengan kodrat perempuan. Hal ini menciptakan

tekanan sosial yang besar bagi perempuan, membuat mereka sulit untuk berpartisipasi aktif dalam politik tanpa mendapatkan resistensi dari lingkungan terdekat mereka (Runyan, 2018). Dukungan keluarga dan lingkungan sosial sangat penting, terutama bagi perempuan yang ingin memulai karir politik, karena mereka membutuhkan jaringan dukungan yang kuat untuk menghadapi tantangan-tantangan politik yang ada.

Meskipun tantangan-tantangan ini masih ada, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di Indonesia. Salah satu langkah yang paling signifikan adalah penerapan kebijakan afirmatif yang mewajibkan keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga politik, termasuk di parlemen. Kebijakan afirmatif ini bertujuan untuk menciptakan ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam politik dengan memberikan kuota minimal keterwakilan perempuan di berbagai tingkatan pemerintahan. Namun, penerapan kebijakan ini di lapangan sering kali menemui berbagai hambatan, baik karena resistensi dari partai politik maupun karena kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya representasi perempuan dalam politik (Kiftiyah, 2019).

Di Kabupaten Kendal, penerapan kebijakan afirmatif ini masih jauh dari ideal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suciptaningsih (2010), rendahnya representasi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal sebagian besar disebabkan oleh minimnya dukungan dari partai politik. Partai politik sering kali tidak memberikan kesempatan yang cukup bagi perempuan untuk mencalonkan diri atau terlibat aktif dalam proses politik, sehingga keterwakilan perempuan di lembaga politik tetap rendah. Selain itu, stereotip gender yang mengakar dalam partai politik juga memperkuat pandangan bahwa perempuan tidak cocok untuk menjadi pemimpin politik, sehingga mereka sering kali dikesampingkan dalam proses pengambilan keputusan di partai.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, berbagai strategi telah diusulkan oleh para peneliti. Salah satunya adalah perlunya kampanye kesadaran masyarakat yang lebih masif mengenai pentingnya partisipasi politik perempuan. Kampanye ini bertujuan untuk mengubah pandangan masyarakat mengenai peran perempuan dalam politik, serta menghilangkan stereotip gender yang selama ini membatasi perempuan dalam ranah publik. Selain itu, penguatan jaringan perempuan juga dianggap sebagai salah satu solusi yang efektif. Jaringan ini dapat berfungsi sebagai wadah bagi perempuan untuk saling berbagi pengalaman, memberikan dukungan moral, serta memperkuat posisi mereka dalam dunia politik (Runyan, 2018).

Pendekatan yang lebih inklusif juga diperlukan dalam melibatkan laki-laki sebagai mitra dalam perjuangan kesetaraan gender. Keterlibatan laki-laki dalam upaya ini penting karena mereka sering kali memegang posisi kekuasaan yang dapat mempengaruhi perubahan dalam struktur politik. Dengan melibatkan laki-laki sebagai mitra, upaya untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dapat dilakukan secara lebih efektif, karena laki-laki dapat berperan dalam mengurangi hambatan-hambatan patriarki yang selama ini membatasi perempuan dalam politik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi-strategi yang dapat meningkatkan partisipasi politik perempuan di Kabupaten Kendal, khususnya pasca Pemilu

2024. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada upaya untuk mengurangi hambatan patriarki serta meningkatkan dukungan dari partai politik dan masyarakat. Dengan pendekatan kualitatif berbasis tinjauan pustaka, penelitian ini menggali berbagai literatur yang relevan terkait isu partisipasi politik perempuan (Hessami, 2020 ; Grau-Sarabia, 2021), serta mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan hambatan dan strategi peningkatan partisipasi politik perempuan di Kabupaten Kendal (Wulandhari 2022 ; Oktaviana & Astuti, 2018). Diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk mendorong partisipasi politik perempuan di Kabupaten Kendal, khususnya dalam konteks pasca Pemilu 2024.

### **Hambatan-Hambatan Partisipasi Politik Perempuan**

Partisipasi politik perempuan di Kabupaten Kendal, seperti halnya di banyak wilayah Indonesia, masih mengalami banyak tantangan. Tantangan ini berasal dari struktur sosial dan budaya yang masih didominasi oleh nilai-nilai patriarki yang kuat, serta minimnya dukungan dari partai politik dan masyarakat. Berbagai studi telah menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada untuk mendukung keterwakilan perempuan, implementasinya masih jauh dari optimal. Ada sejumlah faktor yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi keterlibatan perempuan dalam politik lokal di Kendal.

Budaya patriarki masih mendominasi kehidupan sosial dan politik di Kabupaten Kendal. Dalam konteks ini, patriarki merujuk pada sistem sosial di mana laki-laki memiliki peran dominan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam politik. Budaya ini memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi perempuan di ranah publik, terutama dalam politik. Stereotip gender yang membatasi perempuan hanya pada peran-peran domestik terus dilanggengkan melalui norma-norma sosial, pendidikan, dan institusi keluarga (Kalibonso, 2019).

Salah satu manifestasi dari budaya patriarki ini adalah pandangan bahwa politik adalah "ranah laki-laki", sementara perempuan lebih cocok menjalani peran domestik sebagai ibu dan istri. Hal ini mengakibatkan perempuan merasa kurang percaya diri untuk terlibat dalam politik atau mengambil peran kepemimpinan di masyarakat. Dalam banyak kasus, perempuan yang mencoba untuk terjun ke politik sering kali mengalami tekanan sosial, baik dari keluarga maupun lingkungan sekitarnya, yang menganggap bahwa peran mereka seharusnya tetap terbatas pada rumah tangga. Hambatan kultural ini, yang dilandasi oleh nilai-nilai patriarki, menjadi penghalang utama bagi perempuan untuk memasuki dan berpartisipasi dalam ranah politik.

Budaya patriarki juga mempengaruhi cara partai politik merekrut dan mendukung kader perempuan. Banyak partai politik masih lebih memilih laki-laki sebagai calon anggota legislatif atau pemimpin partai karena mereka dianggap lebih "kompeten" atau "berpengalaman" dalam bidang politik. Hal ini menyebabkan keterwakilan perempuan dalam partai politik dan lembaga legislatif di Kabupaten Kendal masih sangat rendah (Suciptaningsih, 2010).

Kekerasan dan diskriminasi berbasis gender juga menjadi faktor penting yang menghambat partisipasi perempuan dalam politik. Kekerasan politik berbasis gender dapat berbentuk fisik, verbal, maupun psikologis, dan sering kali dialami oleh perempuan yang terlibat dalam proses politik, baik sebagai calon legislatif maupun sebagai aktivis. Kekerasan ini tidak hanya berdampak langsung pada perempuan yang menjadi korban, tetapi juga menimbulkan efek jera bagi perempuan lain yang berkeinginan untuk berpartisipasi dalam politik (Kiftiyah, 2019).

Diskriminasi gender dalam politik juga terlihat dari cara partai politik dan masyarakat memandang perempuan politisi. Perempuan sering kali dinilai berdasarkan penampilan fisik atau perilaku pribadi mereka, daripada kemampuan atau pencapaian mereka dalam politik. Misalnya, perempuan yang bersikap tegas sering kali dianggap sebagai "kasar" atau "tidak pantas", sementara laki-laki yang menunjukkan sikap yang sama dianggap sebagai pemimpin yang kuat. Persepsi gender semacam ini menciptakan hambatan psikologis bagi perempuan untuk terlibat dalam politik, karena mereka harus menghadapi standar ganda yang tidak dihadapi oleh laki-laki.

Perempuan di Kabupaten Kendal juga menghadapi hambatan yang berasal dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam banyak kasus, keluarga masih memegang peran penting dalam menentukan peran dan tanggung jawab seorang perempuan. Perempuan yang mencoba terjun ke politik sering kali dihadapkan pada dilema antara tanggung jawab keluarga dan aspirasi politik. Banyak perempuan yang merasa tertekan untuk memilih antara karier politik atau tanggung jawab domestik, karena anggapan bahwa seorang ibu atau istri yang baik seharusnya memprioritaskan keluarga di atas segalanya (Runyan, 2018).

Masyarakat secara luas juga berperan dalam menciptakan atau menghalangi lingkungan yang mendukung partisipasi politik perempuan. Dalam banyak kasus, masyarakat cenderung skeptis terhadap perempuan yang terlibat dalam politik, karena stereotip bahwa perempuan kurang kompeten atau kurang mampu memimpin dibandingkan laki-laki. Dukungan masyarakat yang rendah ini juga berdampak pada tingkat elektabilitas perempuan dalam pemilihan umum, karena pemilih sering kali lebih memilih calon laki-laki yang dianggap lebih "cocok" untuk memimpin.

### **Strategi Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan**

Meskipun hambatan-hambatan tersebut cukup signifikan, ada berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di Kabupaten Kendal. Strategi-strategi ini bertujuan untuk mengurangi hambatan struktural dan kultural yang dihadapi perempuan, serta menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi perempuan untuk terlibat dalam politik. Beberapa pendekatan yang diusulkan mencakup kebijakan afirmatif, kampanye kesadaran masyarakat, penguatan jaringan perempuan, serta pelibatan laki-laki sebagai mitra dalam memperjuangkan kesetaraan gender.

Salah satu strategi utama untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan adalah penerapan kebijakan afirmatif, seperti kuota keterwakilan perempuan dalam partai politik

dan lembaga legislatif. Kebijakan afirmatif ini dirancang untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang setara dengan laki-laki dalam proses politik, serta untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi akibat budaya patriarki dan diskriminasi gender. Dalam konteks ini, kuota keterwakilan perempuan dapat menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan jumlah perempuan di parlemen dan lembaga politik lainnya (O'Brien, & Piscopo, 2019).

Namun, kebijakan afirmatif saja tidak cukup. Kebijakan ini harus didukung oleh upaya lain, seperti pendidikan politik dan pelatihan kepemimpinan bagi perempuan. Banyak perempuan yang belum memiliki pengalaman atau pengetahuan yang memadai tentang politik, sehingga sulit bagi mereka untuk memanfaatkan kuota keterwakilan yang tersedia. Oleh karena itu, pendidikan politik yang komprehensif sangat penting untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam berpolitik. Pelatihan kepemimpinan juga diperlukan untuk membantu perempuan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk memimpin dan mengambil keputusan dalam politik (Ford, 2018).

Selain itu, partai politik harus berperan aktif dalam merekrut dan mendukung kader perempuan. Partai politik diharapkan tidak hanya memberikan tempat bagi perempuan dalam daftar calon legislatif, tetapi juga memberikan dukungan yang nyata dalam bentuk pelatihan, pendampingan, dan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk bersaing dalam pemilu. Partai politik juga harus memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mengambil peran kepemimpinan dalam partai.

Selain kebijakan afirmatif, kampanye kesadaran masyarakat juga merupakan strategi penting untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Kampanye ini bertujuan untuk mengubah persepsi dan sikap masyarakat terhadap perempuan dalam politik, serta untuk mengurangi stereotip gender yang membatasi peran perempuan. Kampanye kesadaran masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk media sosial, televisi, radio, dan acara-acara publik.

Kampanye kesadaran masyarakat yang efektif harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan pemimpin lokal yang memiliki pengaruh dalam komunitas. Tokoh-tokoh ini dapat berperan sebagai duta kesetaraan gender, yang mempromosikan pentingnya partisipasi perempuan dalam politik dan mengadvokasi perubahan budaya yang lebih inklusif. Selain itu, organisasi perempuan juga dapat berperan penting dalam menyelenggarakan kampanye ini, dengan memobilisasi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik dan menyuarkan aspirasi mereka (Runyan, 2018).

Penguatan jaringan perempuan politisi dan aktivis juga merupakan langkah strategis untuk mendukung partisipasi perempuan dalam politik. Jaringan ini dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, pengetahuan, dan dukungan di antara perempuan yang terlibat dalam politik. Melalui jaringan ini, perempuan dapat saling membantu untuk mengatasi hambatan yang mereka hadapi, serta memperkuat posisi mereka dalam partai politik dan lembaga legislatif.

Jaringan perempuan juga dapat berfungsi sebagai platform untuk mempromosikan agenda kesetaraan gender dalam politik. Misalnya, jaringan ini dapat mengadvokasi

kebijakan-kebijakan yang mendukung keterlibatan perempuan, seperti penghapusan kekerasan berbasis gender dalam politik dan peningkatan akses perempuan terhadap sumber daya politik. Dengan demikian, jaringan perempuan tidak hanya bermanfaat bagi individu-individu yang tergabung di dalamnya, tetapi juga bagi perempuan secara umum di Kabupaten Kendal (Aspinall & Berenschot, 2019). Kesetaraan gender bukan hanya tanggung jawab perempuan, tetapi juga laki-laki. Oleh karena itu, pelibatan laki-laki sebagai mitra dalam memperjuangkan

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan partisipasi politik perempuan di Kabupaten Kendal pasca Pemilu 2024 menghadapi berbagai hambatan yang bersumber dari budaya patriarki yang masih mengakar, diskriminasi gender, serta kurangnya dukungan dari partai politik dan masyarakat. Kendati demokrasi telah menyediakan ruang bagi keterlibatan perempuan dalam politik, tantangan-tantangan tersebut tetap menjadi penghalang signifikan bagi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dan setara.

Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa budaya patriarki, yang tercermin dalam norma-norma sosial dan stereotip gender, masih sangat kuat mempengaruhi pola pikir masyarakat dan peran perempuan dalam ranah politik. Selain itu, minimnya dukungan partai politik, baik dalam bentuk akses terhadap sumber daya maupun kesempatan kepemimpinan, turut membatasi peluang perempuan untuk terlibat lebih dalam dalam proses politik.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, beberapa strategi yang diusulkan antara lain penerapan kebijakan afirmatif, seperti kuota gender dalam struktur partai politik dan lembaga legislatif, serta pelaksanaan kampanye kesadaran masyarakat yang bertujuan untuk mengubah persepsi publik tentang peran perempuan dalam politik. Selain itu, penguatan jaringan dan solidaritas di antara perempuan, baik di tingkat lokal maupun nasional, dapat menjadi langkah penting untuk mendukung partisipasi yang lebih aktif dan terorganisir. Lebih lanjut, melibatkan laki-laki sebagai mitra dalam upaya ini juga dianggap esensial untuk mendorong perubahan sosial yang lebih inklusif dan setara.

Dalam jangka panjang, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan politik yang lebih mendukung dan inklusif bagi perempuan di Kabupaten Kendal. Ini meliputi perubahan budaya yang lebih luas, peningkatan pendidikan politik, dan kebijakan yang lebih responsif terhadap isu-isu kesetaraan gender. Melalui pendekatan yang sistematis dan kolaboratif, partisipasi politik perempuan diharapkan dapat meningkat secara signifikan, sehingga memberikan kontribusi nyata dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal maupun nasional.

### Daftar Pustaka

- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (Eds.). (2010). *Problems of democratisation in Indonesia: elections, institutions and society*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik edisi revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ford, L. (2018). *Women and politics: The pursuit of equality*. Routledge.
- Grau-Sarabia, M., & Fuster-Morell, M. (2021). Gender approaches in the study of the digital economy: a systematic literature review. *Humanities and Social Sciences Communications*, 8(1), 1-10.
- Hessami, Z., & da Fonseca, M. L. (2020). Female political representation and substantive effects on policies: A literature review. *European Journal of Political Economy*, 63, 101896.
- Kiftiyah, A. (2019). Perempuan dalam partisipasi politik di Indonesia. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 14(1), 1-13.
- Novela, D. A. (2023). Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Partisipasi Politik Perempuan Di India: Studi Kasus Mayawati Kunari Dan Perjuangannya Melawan Diskriminasi Politik Terhadap Perempuan Dalit. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(7), 818-831.
- O'Brien, D. Z., & Piscopo, J. M. (2019). The impact of women in parliament. *The Palgrave handbook of women's political rights*, 53-72.
- Oktaviana, E., & Astuti, P. (2018). Partisipasi Perempuan di DPRD Periode 2014-2018 di Kabupaten Kendal. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(01), 111-120.
- Runyan, A. S. (2018). *Global gender politics*. Routledge.
- Setyawan, B. (2020). Patriarki Sebagai Akar Diskriminasi Gender di Sri Lanka. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 3(1), 1-14.
- Suciptaningsih, O. A. (2010). Partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif di Kabupaten Kendal. *Komunitas*, 2(2).
- Wulandhari, D. A. (2022). Analisis Anggaran Responsif Gender Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017-2018. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(3), 311-324.